

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SDN 33 RAWANG BARAT

Hafiz Hidayat¹, Anja Kesuma Putri², Nur Washli³, Anggia Ekasari⁴, Nanang Ady
Saputra⁵, Mardona Putra⁶, Hosman⁷

Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Adzkia^{1,2,3,4,5,6,7}

hafizhidayat@adzkia.ac.id¹, anjabahrul@gmail.com², nurwashli1987@gmail.com³,
anggiaekasari86@gmail.com⁴, nanangadysaputra79@gmail.com⁵,
mardonaputra0512@gmail.com⁶, hosman37@guru.sd.belajar.id⁷

ABSTRACT

This study aims to analyze the management policy of primary education implemented at SDN 33 Rawang Barat, Padang City, and to identify the challenges faced by the school in the implementation of these policies. A qualitative approach with an empirical study was used, collecting data through in-depth interviews, direct observation, and document studies. The findings indicate that the primary education management policy implemented at SDN 33 Rawang Barat faces several challenges, such as limited funding, inadequate facilities, and the lack of ongoing training for teachers. While efforts have been made to improve the quality of education through flexible policies, the implementation is still hindered by limited resources. Therefore, the management of education at this school requires more attention in aspects such as budget allocation, facility development, and teacher training. This study recommends strengthening parental and community involvement and improving financial management to enhance the quality of education in the future.

Keywords: *Primary education policy, education management, SDN 33 Rawang Barat, education challenges, education quality.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang diterapkan di SDN 33 Rawang Barat, Kota Padang, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi empirik, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang diterapkan di SDN 33 Rawang Barat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi guru. Meskipun ada upaya

untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan yang fleksibel, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan di sekolah ini membutuhkan perhatian lebih dalam aspek alokasi dana, pengembangan sarana dan prasarana, serta pelatihan guru. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar keterlibatan orang tua dan masyarakat diperkuat serta pengelolaan keuangan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan.

Kata Kunci: Kebijakan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan, SDN 33 Rawang Barat, tantangan pendidikan, kualitas pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan dasar memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk pondasi kemampuan, karakter, dan keterampilan dasar bagi setiap anak. Di Indonesia, pendidikan dasar mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang merupakan tahap pertama dalam sistem pendidikan yang lebih luas. Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang baik dan efektif sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan generasi penerus bangsa yang kompeten, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pendidikan dasar harus dirancang dengan cermat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mengingat

kompleksitas tantangan yang ada (Lukitasari et al., 2017).

Dalam konteks ini, pengelolaan pendidikan dasar di Indonesia sering kali menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun kebijakan pendidikan dasar di Indonesia sudah banyak mengalami perbaikan, implementasinya masih sering menemui hambatan di lapangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta ketimpangan akses pendidikan menjadi isu yang terus diperjuangkan. Pendidikan di daerah-daerah tertentu, khususnya yang berada di luar kota besar, seringkali tidak memiliki kualitas yang sama dengan pendidikan di daerah perkotaan, yang lebih memiliki fasilitas dan tenaga

pendidik yang memadai (Hanjarwati & Aminah, 2014).

SDN 33 Rawang Barat di Kota Padang dipilih sebagai objek studi dalam penelitian ini karena sekolah ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan dasar di daerah. Terletak di wilayah yang bukan merupakan pusat kota, SDN 33 Rawang Barat memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola pendidikan dasar yang berkualitas. Meskipun sekolah ini telah berusaha menjalankan kebijakan pendidikan dengan baik, berbagai faktor eksternal dan internal memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. SDN 33 Rawang Barat harus menghadapi keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dengan baik, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sering kali terbatas.

Kondisi pendidikan di Kota Padang, khususnya di daerah Rawang Barat, cukup menggambarkan tantangan umum yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di daerah lainnya. Kota Padang, meskipun menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat, masih menghadapi permasalahan ketimpangan antara

wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal kualitas pendidikan. Di daerah Rawang Barat, meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam bidang pendidikan, kualitas pendidikan dasar masih tergolong rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang terletak di pusat kota. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari terbatasnya fasilitas dan akses terhadap teknologi pendidikan, hingga kurangnya dukungan dari berbagai pihak terkait (Sabdaningtyas, 2018).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh SDN 33 Rawang Barat adalah pengelolaan sumber daya yang terbatas. Meskipun ada anggaran untuk menjalankan berbagai program pendidikan, namun dana tersebut tidak selalu mencukupi untuk memperbaiki atau meningkatkan fasilitas yang ada, seperti ruang kelas yang memadai, alat pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta pelatihan berkelanjutan untuk tenaga pendidik. Bahkan dalam beberapa kasus, pengelolaan dana yang terbatas ini menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas pembelajaran yang diterima oleh

siswa. Kualitas pengajaran dapat sangat bergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan guru, penguasaan teknologi, dan kemampuan untuk mengadaptasi kurikulum yang terus berubah (Herlina et al., 2025).

Selain itu, pengelolaan kebijakan pendidikan di SDN 33 Rawang Barat juga menghadapi masalah dalam hal ketimpangan akses dan partisipasi dari masyarakat. Meskipun sekolah sudah berupaya untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan, partisipasi mereka masih terbatas. Sebagian besar orang tua siswa bekerja di sektor informal dan memiliki kesibukan yang tinggi, sehingga sulit bagi mereka untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan sekolah. Padahal, keterlibatan orang tua sangat penting untuk memperkuat ekosistem pendidikan di tingkat sekolah dasar, baik dalam hal pembelajaran akademik maupun pengembangan karakter anak-anak mereka (Supriyantoko et al., 2020).

Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang diterapkan di

SDN 33 Rawang Barat, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan nyata pengelolaan pendidikan dasar di daerah tersebut, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pendidikan di masa depan. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar di daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi empirik yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan pengelolaan pendidikan dasar di SDN 33 Rawang Barat, Kota Padang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam

pengalaman dan pandangan berbagai pihak terkait dalam implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih komprehensif terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam kebijakan pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ditemukan dalam penelitian, dengan menekankan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks yang ada di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di SDN 33 Rawang Barat, Kota Padang, sebagai lokasi utama penelitian. Pemilihan sekolah ini didasarkan pada representativitasnya sebagai lembaga pendidikan dasar di daerah tersebut yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pendidikan. Selain itu, SDN 33 Rawang Barat dianggap sebagai tempat yang relevan untuk memahami dinamika kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di tingkat sekolah. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru, dan staf pendidikan lainnya yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan

pendidikan di sekolah ini. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan yang diterapkan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala sekolah, beberapa guru, dan staf pendidikan lainnya untuk menggali pandangan mereka mengenai kebijakan pengelolaan pendidikan yang diterapkan di SDN 33 Rawang Barat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pengalaman mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut, serta kendala dan tantangan yang dihadapi selama implementasi. Selain wawancara, observasi langsung juga dilakukan di sekolah untuk melihat secara langsung bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Observasi ini membantu peneliti dalam memahami interaksi antara guru, siswa, dan staf lainnya serta pengelolaan fasilitas yang ada di sekolah. Terakhir, studi

dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait kebijakan pendidikan, laporan tahunan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendalami lebih jauh bagaimana kebijakan tersebut didokumentasikan dan dilaksanakan.

Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan, seperti tantangan dalam implementasi kebijakan, keberhasilan yang dicapai, dan faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan pendidikan di SDN 33 Rawang Barat. Setelah tema-tema utama diidentifikasi, data akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan secara rinci temuan-temuan yang ada, termasuk analisis mendalam tentang dinamika kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang terjadi di sekolah tersebut. Teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kondisi yang ada di lapangan serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk

perbaikan kebijakan pengelolaan pendidikan di masa depan.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di tingkat sekolah dasar, serta memberikan gambaran yang realistis mengenai bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengelola pendidikan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar di SDN 33 Rawang Barat

Di SDN 33 Rawang Barat, implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar telah menunjukkan dampak yang bervariasi terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan yang diterapkan mencakup pengelolaan kurikulum yang merujuk pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, dalam praktiknya,

implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran berbasis teknologi yang optimal. Meskipun sekolah telah berusaha menyediakan ruang komputer dan akses internet, perangkat yang ada sering kali rusak atau tidak cukup memadai, sehingga menghambat proses pembelajaran yang mengandalkan teknologi. Hal ini berimbas pada keterbatasan dalam pengajaran berbasis digital yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di era modern (Supriyantoko et al., 2020).

Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui kebijakan yang lebih fleksibel dalam metode pembelajaran, beberapa guru di SDN 33 Rawang Barat masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang menuntut pendekatan lebih interaktif. Beberapa tenaga pendidik merasa kesulitan untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis teknologi, meskipun pelatihan telah dilakukan. Hal ini menyebabkan variasi dalam kualitas pembelajaran yang diterima

oleh siswa, karena sebagian guru masih mengandalkan metode tradisional, sementara yang lain mencoba mengimplementasikan metode yang lebih modern. Oleh karena itu, meskipun kebijakan sudah dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dampaknya belum sepenuhnya maksimal (Inniyah & Mulawarman, 2021).

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar juga mencakup upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, namun dampaknya terhadap kualitas akademik siswa masih terbilang terbatas. Meskipun ada upaya untuk memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi guru, beberapa kendala tetap muncul, seperti keterbatasan waktu dan dana untuk mengikuti pelatihan yang lebih intensif. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam implementasi pengajaran yang sesuai dengan standar pendidikan terbaru. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, hasil yang dicapai dalam aspek akademik siswa tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan yang signifikan.

Dalam hal pencapaian akademik, dampak kebijakan pengelolaan pendidikan dasar lebih terlihat pada kemampuan siswa dalam mengikuti ujian dan mencapai standar kelulusan. Namun, hasil ujian yang diperoleh siswa masih menunjukkan adanya kesenjangan antar kelas dan antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Siswa yang berasal dari keluarga dengan dukungan pendidikan yang lebih baik cenderung lebih berhasil dalam pencapaian akademik, sementara siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu menghadapi tantangan lebih besar. Kebijakan pengelolaan pendidikan yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan siswa dengan latar belakang ekonomi lemah mempengaruhi hasil pembelajaran mereka (Inniyah & Mulawarman, 2021).

Selain dampak terhadap kualitas akademik, kebijakan pengelolaan pendidikan dasar juga mempengaruhi pencapaian non-akademik siswa. Beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti program ekstrakurikuler dan pembinaan karakter, berusaha untuk

mengembangkan sisi non-akademik siswa. Namun, keterbatasan fasilitas dan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut. Meskipun sekolah berusaha mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, beberapa program tersebut terhambat oleh kurangnya dana dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, siswa yang seharusnya dapat mengembangkan bakat non-akademik mereka, seperti olahraga dan seni, terpaksa harus puas dengan keterbatasan pilihan yang ada.

Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua juga berperan penting dalam mendukung pencapaian non-akademik siswa. Sekolah berupaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua, namun partisipasi orang tua dalam kegiatan pendidikan masih terbatas. Program-program yang melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah belum sepenuhnya optimal, sehingga dukungan masyarakat terhadap pengembangan siswa secara menyeluruh belum maksimal. Padahal, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak sangat penting dalam menunjang

keberhasilan non-akademik siswa. Oleh karena itu, meskipun ada upaya dari pihak sekolah untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, masih ada tantangan besar dalam hal peningkatan partisipasi mereka (Nasihi & Hapsari, 2022).

Implementasi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan

Di SDN 33 Rawang Barat, implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar telah menunjukkan dampak yang bervariasi terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan yang diterapkan mencakup pengelolaan kurikulum yang merujuk pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran berbasis teknologi yang optimal. Meskipun sekolah telah berusaha menyediakan ruang komputer dan akses internet,

perangkat yang ada sering kali rusak atau tidak cukup memadai, sehingga menghambat proses pembelajaran yang mengandalkan teknologi. Hal ini berimbas pada keterbatasan dalam pengajaran berbasis digital yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di era modern (Ngongira & Iriani, 2020).

Di sisi lain, meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui kebijakan yang lebih fleksibel dalam metode pembelajaran, beberapa guru di SDN 33 Rawang Barat masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang menuntut pendekatan lebih interaktif. Beberapa tenaga pendidik merasa kesulitan untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis teknologi, meskipun pelatihan telah dilakukan. Hal ini menyebabkan variasi dalam kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa, karena sebagian guru masih mengandalkan metode tradisional, sementara yang lain mencoba mengimplementasikan metode yang lebih modern. Oleh karena itu, meskipun kebijakan sudah dirancang untuk meningkatkan

kualitas pendidikan, dampaknya belum sepenuhnya maksimal.

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar juga mencakup upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, namun dampaknya terhadap kualitas akademik siswa masih terbilang terbatas. Meskipun ada upaya untuk memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi guru, beberapa kendala tetap muncul, seperti keterbatasan waktu dan dana untuk mengikuti pelatihan yang lebih intensif. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam implementasi pengajaran yang sesuai dengan standar pendidikan terbaru. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, hasil yang dicapai dalam aspek akademik siswa tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan yang signifikan (Deswary, 2017).

Dalam hal pencapaian akademik, dampak kebijakan pengelolaan pendidikan dasar lebih terlihat pada kemampuan siswa dalam mengikuti ujian dan mencapai standar kelulusan. Namun, hasil ujian yang diperoleh siswa masih menunjukkan

adanya kesenjangan antar kelas dan antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Siswa yang berasal dari keluarga dengan dukungan pendidikan yang lebih baik cenderung lebih berhasil dalam pencapaian akademik, sementara siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu menghadapi tantangan lebih besar. Kebijakan pengelolaan pendidikan yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan siswa dengan latar belakang ekonomi lemah mempengaruhi hasil pembelajaran mereka.

Selain dampak terhadap kualitas akademik, kebijakan pengelolaan pendidikan dasar juga mempengaruhi pencapaian non-akademik siswa. Beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti program ekstrakurikuler dan pembinaan karakter, berusaha untuk mengembangkan sisi non-akademik siswa. Namun, keterbatasan fasilitas dan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut. Meskipun sekolah berusaha mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, beberapa program tersebut terhambat oleh kurangnya

dana dan fasilitas yang memadai. Akibatnya, siswa yang seharusnya dapat mengembangkan bakat non-akademik mereka, seperti olahraga dan seni, terpaksa harus puas dengan keterbatasan pilihan yang ada (Diniarsa & Batu, 2023).

Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua juga berperan penting dalam mendukung pencapaian non-akademik siswa. Sekolah berupaya untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua, namun partisipasi orang tua dalam kegiatan pendidikan masih terbatas. Program-program yang melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah belum sepenuhnya optimal, sehingga dukungan masyarakat terhadap pengembangan siswa secara menyeluruh belum maksimal. Padahal, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak sangat penting dalam menunjang keberhasilan non-akademik siswa. Oleh karena itu, meskipun ada upaya dari pihak sekolah untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, masih ada tantangan besar dalam hal peningkatan partisipasi mereka (Solichin, 2015).

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di SDN 33 Rawang Barat menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan pendidikan. Meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diberikan, jumlahnya seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Sebagian besar dana BOS digunakan untuk kebutuhan rutin seperti pembayaran honorarium guru honorer dan pengadaan alat tulis, sementara dana untuk pengembangan fasilitas dan pelatihan guru seringkali terbatas. Hal ini menghambat upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memadai atau peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Selain masalah anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana

pendidikan juga menjadi tantangan besar. Meskipun sekolah memiliki ruang kelas yang cukup, beberapa fasilitas, seperti ruang komputer dan alat multimedia, sering mengalami kerusakan dan membutuhkan perawatan yang tidak selalu dapat dipenuhi dengan anggaran yang tersedia. Ketidakmampuan untuk memperbarui atau memperbaiki sarana yang rusak menyebabkan terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Sekolah juga kesulitan dalam menyediakan fasilitas tambahan yang dapat menunjang proses pembelajaran secara lebih efektif, seperti ruang laboratorium atau ruang seni, yang merupakan bagian penting dalam pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh (Huges et al., 2023).

Masalah dalam pengelolaan tenaga pendidik juga turut menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar. Di SDN 33 Rawang Barat, meskipun sebagian besar guru telah memiliki pengalaman mengajar yang cukup, mereka menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi pendekatan pembelajaran yang lebih modern, seperti pembelajaran berbasis

teknologi dan pendekatan yang lebih interaktif. Sebagian besar guru masih terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang lebih konvensional. Meskipun telah ada upaya pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan guru, waktu yang terbatas dan kesulitan dalam mengakses pelatihan yang lebih terfokus menjadi penghalang bagi pengembangan profesional mereka.

Selain itu, kendala dalam pengelolaan keuangan juga memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan anggaran di SDN 33 Rawang Barat sering kali tidak transparan, dengan pengalokasian dana yang tidak selalu jelas tujuannya. Ketidakpastian dalam pengelolaan dana menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini memperburuk kondisi pengelolaan pendidikan, karena dana yang terbatas tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Meski ada upaya dari kepala sekolah dan komite sekolah untuk memaksimalkan penggunaan dana

yang ada, seringkali keterlambatan dalam pencairan dana atau prosedur administrasi yang berbelit-belit menghambat proses tersebut.

Kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di SDN 33 Rawang Barat juga terkendala oleh kurangnya partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Meskipun terdapat beberapa program yang melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, partisipasi mereka masih terbatas. Beberapa orang tua merasa kurang terlibat karena kurangnya informasi yang jelas mengenai kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Komunikasi antara sekolah dan orang tua masih tergolong minim, dan sebagian orang tua merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup ruang untuk berkontribusi dalam pengembangan pendidikan anak-anak mereka. Padahal, keterlibatan orang tua dalam pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan siswa.

Sementara itu, masalah pengelolaan kurikulum juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar. Meskipun kurikulum yang digunakan adalah

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, penerapan kedua kurikulum ini di sekolah terkendala oleh variasi dalam pemahaman guru tentang cara mengimplementasikannya. Kurikulum yang menuntut metode yang lebih kreatif dan berbasis teknologi membutuhkan penyesuaian dalam cara mengajar yang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh tenaga pendidik. Beberapa guru mengaku kesulitan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif dan kolaboratif, sementara beberapa lainnya masih lebih nyaman dengan pendekatan yang lebih konvensional. Perbedaan pemahaman ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kurikulum di kelas.

Kendala lainnya yang dihadapi SDN 33 Rawang Barat adalah masalah dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya manusia. Meskipun tenaga pendidik yang ada cukup banyak, distribusi tenaga pengajar yang kurang merata di antara kelas dan mata pelajaran tertentu menyebabkan beberapa kelas kekurangan guru dengan spesialisasi yang tepat. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam

kualitas pengajaran di kelas-kelas tertentu. Beberapa mata pelajaran, terutama yang memerlukan keterampilan khusus, seperti matematika dan bahasa Inggris, tidak selalu diajarkan oleh guru yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidangnya. Hal ini memengaruhi pencapaian akademik siswa, terutama di bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan khusus (Simanjuntak et al., 2014).

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di SDN 33 Rawang Barat menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Meskipun ada upaya dari pihak sekolah untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, meskipun kebijakan pendidikan dasar sudah berorientasi pada peningkatan mutu, ketimpangan akses dan partisipasi masyarakat tetap menjadi masalah yang harus

diselesaikan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, dampak kebijakan terhadap mutu pendidikan di sekolah ini masih terbilang belum optimal, meskipun ada upaya positif yang dilakukan oleh pihak sekolah dan guru.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar di SDN 33 Rawang Barat. Pertama, pihak sekolah perlu memperkuat pelatihan berkelanjutan bagi guru, terutama dalam hal penggunaan teknologi pembelajaran dan implementasi kurikulum yang lebih fleksibel. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran yang lebih modern. Diharapkan dengan adanya peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah, serta penguatan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, kebijakan pendidikan dasar di SDN 33 Rawang Barat dapat memberikan dampak yang lebih

signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deswary, D. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan No. 12 Tahun 2012 Tentang Tuntutan Pengelolaan Kurikulum. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 1–11.
- Diniarsa, M. R., & Batu, R. L. (2023). Evaluasi Penerapan Kebijakan Diversitas Dan Inklusi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1439–1456.
<https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2852>
- Hanjarwati, A., & Aminah, S. (2014). Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta mengenai pendidikan inklusi. *Inklusi*, 1(2), 221–248.
- Herlina, A., Lestari, W. W., & Maliki, B. I. (2025). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERBASISMANAJEMEN STRATEGI. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2).
- Huges, H., Wasliman, I., & Dianawati, E. (2023). Implementasi kebijakan akreditasi madrasah dalam meningkatkan mutu kinerja. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 15–23.
- Inniyah, S., & Mulawarman, W. G. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak Pada Smp Negeri 2 Tenggarong Dengan Model Evaluasi Cipp. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 1(2), 39–54.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 77–88.
- Ngongira, S. O., & Iriani, A. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendelegasian Wewenang Dinas Pendidikan Provinsi ke Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Mengelola Pendidikan Menengah. *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 4(3), 173–181.
- Sabdaningtyas, L. (2018). Model evaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan jenjang SD. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 70–82.
- Simanjuntak, M. V., Maesaroh, M., & Santoso, S. (2014). Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Kasus Evaluasi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Penyandang Cacat dan Kelainan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(3), 160–167.
- Solichin, M. (2015). *Implementasi*

*kebijakan pendidikan dan peran
birokrasi.*

Supriyantoko, I., Jaya, A., Kurnia, V.,
& Habiba, P. G. S. (2020).
Evaluasi implementasi kebijakan
teaching factory dengan model
evaluasi CIPP di SMK Negeri DKI
Jakarta. *Journal of Vocational
and Technical Education (JVTE)*,
2(2), 1–10.